PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kompas Hari: Senin Tanggal: 15 Juli 2024 Halaman: 11

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Sejumlah pedagang kaki lima menawarkan barang dagangan dari balik pagar Teras Malioboro 2, kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Sabtu (13/7/2024) malam.

Saat PKL Malioboro Akan Direlokasi Lagi

Rencana relokasi kembali memicu kericuhan antara sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, dan petugas, Sabtu (13/7).

Ratusan orang berkumpul di halaman depan Teras Malioboro 2, Sabtu (13/7/2024) malam. Mereka terdiri dari dua pihak, yakni para pedagang kaki lima atau PKL serta petugas Jogoboro dan Jogomaton yang dipekerjakan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sejak Sabtu sekitar pukul 18.30 WIB, para PKL itu ingin keluar dari Teras Malioboro 2, salah satu sentra PKL di kawasan Malioboro. Mereka hendak berdagang di trotoar sisi timur kawasan Malioboro. Aksi itu sebagai protes atas rencana relokasi PKL di Teras Malioboro 2 yang dinilai tak transparan.

Namun, petugas menutup pagar Teras Malioboro 2 sehingga PKL tak bisa keluar.

Perwakilan PKL yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta kemudian meminta berdialog dengan pemimpin petugas keamanan yang menutup pagar Teras Malioboro 2.

Beberapa PKL juga berjualan di dekat pagar Teras Malioboro 2. Mereka menawarkan barang jualan, antara lain pakaian dan tas, kepada pengunjung yang melintas di luar pagar. Sebagian PKL bahkan menggantungkan barang dagangan mereka di pagar.

Petugas lalu mengambil sejumlah barang dagangan PKL yang tergantung di pagar. Kericuhan lebih besar dapat dihindari karena kedua pihak bisa menahan diri.

Sekitar pukul 1945 WIB, perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menemui para PKL di Teras Malioboro 2. Para PKL tetap dilarang untuk berjualan di trotoar Malioboro.

Merasa tak puas dengan hasil dialog, perwakilan PKL meminta perwakilan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya menghubungi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY untuk membicarakan tuntutan para PKL terkait rencana relokasi.

Naman, sebelum dialog lanjutan terjadi, kericuhan pecah. Pukul 20.20 WIB, para PKL berupaya membuka paksa pagar Teras Malioboro 2. Aksi itu dihalangi petugas sehingga terjadi saling dorong antara PKL dan petugas. Sebagian pagar Teras Malioboro 2 rusak karena peristiwa tersebut.

Situasi mulai kondusif sekitar pukul 21.00 WIB. Pagar Teras Malioboro 2 lalu dibuka sehingga PKL dan pengunjung bisa berlalu lalang.

Pertanyakan relokasi

Kericuhan pada Sabtu malam itu berawal dari rencana Pemprov DIY yang ingin merelokasi para PKL yang selama ini berjualan di Teras Malioboro 2. Alasannya, lahan Teras Malioboro 2 akan dipakai untuk pembangunan proyek Jogja Planning Gallery.

Relokasi itu bakal menjadi yang kedua bagi para PKL di Teras Malioboro 2. Sebelumnya, selama puluhan tahun, mereka berjualan di trotoar atau jalur pedestrian kawasan Malioboro. Pada Februari 2022, Pemprov DIY merelokasi ribuan PKL ke dua lokasi, yakni Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2.

Kini, setelah sekitar dua tahun, PKL yang berjualan di Teras Malioboro 2 hendak direlokasi kembali, sedangkan PKL di Teras Malioboro 1 tak direlokasi. Menurut rencana, para PKL di Teras Malioboro 2 dipindahkan ke dua lokasi berbeda di kawasan Malioboro.

Rencana relokasi itu dipertanyakan para PKL. Mereka menilai proses perencanaan relokasi itu tidak transparan karena tak melibatkan mereka.

Salah satu pihak yang paling gencar mempertanyakan relokasi itu adalah Paguyuban Tri Dharma, salah satu paguyuban PKL di Teras Malioboro 2. Menurut Upik Supriyati, salah seorang pengurus Paguyuban Tri Dharma, terdapat 1.041 orang PKL di Teras Malioboro 2. Mereka berjualan pakaian, tas, sandal, suvenir, kuliner, dan sebagainya.

Upik memaparkan, ada tiga paguyuban yang menaungi para PKL di Teras Malioboro 2. Dari total 1.041 orang PKL di tempat itu, sebanyak 831 orang di antaranya anggota Paguyuban Tri Dharma.

Upik menjelaskan, pada Jumat (5/7/2024), para PKL melakukan audiensi di DPRD DIY terkait rencana relokasi PKL di Teras Malioboro 2.

Dalam audiensi itu, lanjut Upik, sudah ada kesepakatan bersama untuk menggelar diskusi atau komunikasi dua arah antara pemerintah dan PKL terkait rencana relokasi. Dialog itu dijanjikan digelar dengan batas waktu seminggu sesudah audiensi. Namun, hingga seminggu setelah audiensi, janji menggelar komunikasi dua arah itu tak terwujud.

Itulah kenapa pada Jumat (12/7) malam sejumlah PKL nekat berjualan di trotoar kawasan Malioboro. Mereka menggelar dagangan di trotoar sisi timur kawasan Malioboro. Selain itu, ada pula yang menjajakan dagangan dengan berkeliling. Saat itu, para PKL didatangi oleh petugas keamanan di wilayah Malioboro, tetapi tak terjadi kericuhan.

Dilarang

Sehari kemudian atau Sabtu malam, para PKL hendak kembali berjualan di trotoar. Namun, upaya itu dilarang petugas. Peristiwa itu yang lalu berujung pada kericuhan.

Staf Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Muhammad Rakha Ramadhan, Sabtu malam, di Teras Malioboro 2, menyatakan, para PKL menuntut Pemprov DIY, Pemkot Yogyakarta, beserta DPRD DIY melakukan dialog yang partisipatif dengan para PKL terkait rencana relokasi. "Selama proses dialog, para PKL menginginkan ada penundaan proses relokasi," ujarnya.

Ketua Paguyuban Tri Dharma Arif Usman menyatakan, para PKL berharap ada komunikasi dua arah antara PKL dan pemerintah terkait rencana relokasi. "Kami harus tahu seperti apa relokasi kami ke depan. Kami tak mau sekadar direlokasi, tetapi kesejahteraan kami diabaikan," ucap Arif.

Saat menemui para PKL di Teras Malioboro 2 pada Sabtu malam, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Ekwanto menegaskan, para PKL dilarang berdagang di trotoar kawasan Malioboro.

"Teman-teman kami larang untuk berjualan di (jalur) pedestrian. Ini sebagai bentuk kasih sayang kami kepada teman-teman," katanya.

Sementara itu, Kepala Polresta Yogyakarta Komisaris Besar Aditya Surya Dharma meminta dua pihak yang terlibat kericuhan untuk menahan diri agar tidak terjadi konflik yang lebih besar.

"Sekali lagi, kami mengimbau untuk sama-sama menahan diri agar tidak terjadi eskalasi lebih buruk," ujarnya.

Selain mencegah agar kericuhan yang terjadi itu tidak membesar, penting juga untuk menyelesaikan akar masalah yang memicu peristiwa itu. Dialog yang partisipatif dan transparan terkait dengan rencana relokasi PKL mesti dilakukan agar peristiwa serupa tak terulang.

(HARIS FIRDAUS)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005